

ABSTRAK
Penelitian Hukum Ini Bertujuan untuk Mengetahui Urgensi dan kedudukan Lie Detector dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia berdasarkan Instrumen Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Urgensi dan Kedudukan Lie Detector menghasilkan Peran dan Rekomendasi Hukum terkait kedudukan Lie detector dalam Tindak pidana yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga menghasilkan Pelajaran Terbaik yang bisa didapatkan oleh Indonesia dari pengaturan tentang Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia.
Penelitian hukum ini menggunakan penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP Narkotika dan Peraturan Kapolri 8 No. 10 Tahun 2009 sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal online tentang modifikasi, pidana dan pembedaan serta penyalahgunaan narkotika, dan kamus hukum, kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Black's Law Dictionar sebagai bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan dan studi Kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode penarikan kesimpulan deduktif. Kedudukan Lie detector Sebagai Alat Bukti dalam Hukum acara Pidana Yakni diklasifikasikan penyidik sebagai alat Bukti pendukung yang dijadikan Berkas Tambahan berbentuk berkas Print out yang bersifat sebagai Pelengkap berkas tambahan Penyidikan yang biasanya berkedudukan sebagai Alat Bukti Surat serta keterangan Ahli. Urgensi Lie Detector dalam Pembuktian Tindak Pidana berupa peran besar untuk memudahkan Penyidik mengungkap kejahatan karena sifat fleksibel Lie Detector atau bisa digunakan dalam kasus Tindak pidana Umum dan bisa digunakan sebagai Bukti penunjang dari pertimbangan Penuntut Umum untuk dikaitkan dengan Fakta lain. Kata Kunci : Lie Detector, Pembuktian, Urgensi, Kedudukan.

ABSTRACT
This Legal Research Aims to Know the Urgency and Position of Lie Detectors in Proving Criminal Acts in Indonesia based on the Legal Instruments of the Criminal Procedure Code. Urgency and Position Lie Detector produce Roles and Legal Recommendations related to position Lie detector in Criminal Acts in Indonesia. This research also produces the best lessons that can be obtained by Indonesia from the regulation regarding Proof of Criminal Procedure Law in Indonesia.
This legal research uses normative legal writing with statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The legal material used is RI Law No. 8 of 1981 Criminal Procedure Law on Narcotics and the Chief of Police Regulation 8 No. 10 of 2009 primary legal materials, secondary legal materials in the form of text books, online journals on modification, crime and punishment well narcotics abusers, and legal dictionaries, English-Indonesian dictionaries and Black's Law Dictionar tertiary legal material. The technique of collecting legal materials is in the form of literature studies and case studies using descriptive qualitative methods and deductive inference methods.
The position of Lie Detcor is used by investigators a means of supporting evidence which is used a Supplementary File in the form of a Print Out file which is a complement to additional Investigation files which are usually located Documentary Evidence and Expert testimony. Urgency Lie Detector in the Proof of Criminal Acts in the form of a big role to make it easier for Investigators to uncover crimes because of their flexible nature Lie Detector it can be used in general criminal cases and can be used supporting evidence from the consideration of the public prosecutor to be linked to other facts.
Keywords : Lie Detector, Proof, Urgency, Position.